



Judul : PPATK, Ungkap Tuntas: Transaksi Mencurigikan
Tanggal : Jumat, 10 Maret 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Transaksi Mencurigikan PPATK, Ungkap Tuntas

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan temuan transaksi mencurigikan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Transaksi gelap itu diduga dilakukan oleh 460 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Kemenkeu dalam periode 2009 hingga 2023.

Anggota Komisi III DPR Santoso meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka semua transaksi keuangan mencurigikan pegawai Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu. Patut diduga transaksi mencurigikan tidak hanya dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo (RAT).

“Sudah saatnya PPATK membuka apa yang sebenarnya terjadi atas transaksi keuangan mencurigikan yang dilakukan oleh pegawai pajak, salah satunya Rafael Alun,” ujar Santoso dalam keterangannya, kemarin.

Santoso meyakini, banyak pegawai pajak memiliki harta mencurigikan. Karena itu, dia mendesak PPATK menelusuri transaksi mencurigikan secara komprehensif dan menyerahkan kepada aparat penegak hukum.

“Jika ditelusuri dengan teliti pasti akan banyak ditemukan adanya transaksi mencurigikan itu,” ungkap dia.

Menurut Santoso, pengungkapan harta kekayaan RAT bisa menjadi momentum dan pintu masuk PPATK untuk menelusuri rekening pegawai pajak lainnya. Dia pun mendorong Menkeu Sri Mulyani mendukung langkah tersebut.

Politikus Demokrat itu meminta ada sanksi yang tegas kepada pegawai pajak yang

menyalahi jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Sebab, memberhentikan pegawai yang tidak jujur itu lebih baik daripada mempertahankan mereka, meski berkinerja baik dalam sisi administrasi.

Lebih lanjut, Santoso menuurkan langkah PPATK tersebut untuk memastikan tidak ada lagi pegawai pajak yang melakukan penyelewengan. Penyelewengan bukan hanya merusak nama baik Ditjen Pajak Kemenkeu, juga berpotensi merugikan keuangan negara.

“Tindakan itu sebagai bagian agar pegawai pajak tidak lagi menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara,” kata dia mengingatkan.

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menambahkan, transaksi mencurigikan di lingkungan pegawai Kemenkeu wujud penyelewengan integritas oleh oknum tertentu. Padahal, selama ini pegawai pajak dan bea cukai mendapat upah kerja yang tergolong tinggi seiring beban tugasnya untuk mengejar penerimaan negara.

Puteri mengatakan, temuan PPATK terkait transaksi mencurigikan para pejabat pajak dan bea cukai menimbulkan persepsi negatif bagi masyarakat. Temuan tersebut menjadi momentum bagi Kemenkeu untuk membenahi para oknum dalam internalnya.

Politikus Golkar ini akan mendukung penuh penyelidikan dan penindakan terhadap para oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Dia juga meminta Kemenkeu perlu mengevaluasi integritas para pejabatnya. ■ TIF